



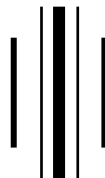
NASKAH KARYA PERSEORANGAN (N K P)

TOPIK

**STRATEGI ADAPTIF *DECISION MAKING*
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MULTIDIMENSIONAL**

JUDUL

**OPTIMALISASI PENANAMAN NILAI KEBANGSAAN
GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME
DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**



OLEH :

NAMA : TARIPAR JAYA, S.E., S.I.K., M.M., M.AK.

NO. SERDIK : 202601002184

POKJAR : III (TIGA)

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI

DIKREG KE-66 T.A. 2026

**OPTIMALISASI PENANAMAN NILAI KEBANGSAAN
GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME
DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika sosial, politik, dan teknologi informasi pada era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin masif, khususnya melalui media sosial dan platform digital, di satu sisi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk radikalisme. Paham radikalisme tidak hanya mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, intoleransi, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Fenomena radikalisme dewasa ini tidak lagi terbatas pada jaringan terorganisir berskala nasional atau internasional, melainkan telah merambah ke tingkat lokal melalui proses infiltrasi yang halus dan sistematis. Penyebaran paham radikal kerap memanfaatkan isu ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta menyasar kelompok rentan seperti generasi muda dan masyarakat dengan tingkat literasi kebangsaan yang masih terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan serius, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital dan pemahaman nilai kebangsaan yang masih terbatas. Penanaman nilai kebangsaan yang mencakup pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta semangat cinta tanah air / nasionalisme merupakan fondasi utama dalam

membangun ketahanan ideologi masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai filter dan benteng moral agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ajaran radikal. Namun dalam praktiknya, upaya penanaman nilai kebangsaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara sistematis. Di wilayah hukum Polres Garut, upaya penanaman nilai kebangsaan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kapasitas sumber manusia, baik dari sisi jumlah dan kompetensi personel berpengaruh terhadap kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat belum sepenuhnya tersusun secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan masih cenderung bersifat insidental, belum berbasis pemetaan kerawanan ideologi dan karakteristik sosial masyarakat, serta belum didukung dengan indikator keberhasilan yang terukur. Kondisi ini menyebabkan pesan kebangsaan yang disampaikan belum sepenuhnya membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menolak paham radikal. Hal tersebut terlihat dari adanya keberadaan eks narapidana terorisme yang berjumlah 3 orang (2025), serta jejak kelompok radikal Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (2022) di wilayah Garut. Kondisi ini menuntut pendekatan pencegahan yang tidak hanya mengandalkan langkah penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pembinaan ideologis dan sosial secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Di sisi lain, kerja sama dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, Kodim, Dinas pendidikan, komunitas masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya terbangun dalam satu pola kemitraan yang terintegrasi. Padahal, keberhasilan penanaman nilai kebangsaan sangat bergantung pada sinergi dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan. Tanpa kerja sama yang kuat, upaya pembinaan cenderung berjalan parsial dan kurang memberikan dampak yang signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya optimalisasi penanaman nilai kebangsaan yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan metode pelaksanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, serta penguatan kerja sama dengan stakeholder. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan masyarakat, mencegah penyebaran paham radikalisme, serta mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polres Garut.

B. Identifikasi Masalah

1. Kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan penanaman nilai kebangsaan belum sepenuhnya optimal.
2. Metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaannya masih bersifat situasional dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
3. Kerja sama dengan stakeholder terkait dalam penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat, seperti Pemerintah Daerah, Kodim, Dinas Pendidikan, komunitas masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat belum terintegrasi secara sistematis.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia guna mendukung kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat?
2. Bagaimana metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat?
3. Bagaimana kolaborasi dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat.

2. Menganalisis metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
3. Menganalisis bentuk dan efektivitas kerja sama dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang peran kepolisian dalam menanamkan nilai kebangsaan guna mencegah penyebaran paham radikal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Polres Garut dalam meningkatkan kapasitas organisasi, membenahi metode pembinaan, memperkuat kerja sama dengan stakeholder dalam penanaman nilai kebangsaan sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada optimalisasi penanaman nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai Pancasila khususnya nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Nasionalisme melalui kegiatan pembinaan kepada masyarakat, dengan fokus kajian pada kapasitas sumber manusia, metode penanaman nilai kebangsaan, serta kerja sama dengan stakeholder guna mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Polres Garut. Tingkatan /tataran wilayah pada Tingkat KOD, penulis mengambil peran sebagai Kapolres; Lokasi/area penelitian di Polres Garut; dan Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 20 - 23 Februari 2026.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan. Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka. Memuat kerangka teori, Studi terdahulu, landasan teori dan berpikir strategis yang berkaitan dengan penanaman nilai kebangsaan.
3. BAB III Metode Penelitian. Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.
4. BAB IV Pembahasan dan Pemecahan Masalah. Menyajikan analisis data, pembahasan hasil analisis, formulasi dan implementasi strategi serta manajemen risiko terkait penanaman nilai kebangsaan.
5. BAB V Penutup. Berisi simpulan hasil penelitian dan saran strategis untuk mengoptimalkan penanaman nilai kebangsaan guna mencegah penyebaran paham radikalisme dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Grand theory.*

Landasan utama dalam penulisan NKP ini menggunakan Teori Manajemen Strategis. Teori ini menekankan bahwa pencapaian tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari proses perumusan strategi yang sistematis, dimulai dari penetapan tujuan, pemetaan kondisi sumber daya internal dan eksternal, hingga pemilihan strategi yang paling tepat. (Wheelen & David, 2008 dalam Asih & Eddy, 2021).

2. *Middle Range Theory.*

a. *Theory Resources-Based View (RBV).*

Teori *Resource-Based View* memandang bahwa kekuatan utama organisasi terletak pada aset, sumber daya, dan kompetensi internal yang dimilikinya. Keunggulan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. (Rengkung, 2015).

b. *Dynamic Capability Theory.*

Dynamic Capability Theory menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang bersifat dinamis. Organisasi dituntut tidak hanya memiliki sumber daya, tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan, memperbarui, dan menyesuaikan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan situasi. (Bleady et al., 2018).

c. *Institutional Theory.*

Institutional Theory memandang bahwa perilaku dan keputusan organisasi dipengaruhi oleh lingkungan

eksternal, seperti regulasi, kebijakan, struktur organisasi, serta norma dan nilai sosial yang berlaku. Organisasi tidak berdiri secara independen, melainkan berada dalam suatu sistem yang menuntut kesesuaian dengan aturan dan ekspektasi lingkungan. (Scott dalam Villadsen, 2011).

3. *Applied Theory.*

a. *Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).*

Pendekatan terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)*. SFAS merupakan alat analisis strategis yang berfungsi merangkum faktor-faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut berasal dari hasil analisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, yang kemudian diberi bobot dan nilai untuk menentukan tingkat prioritas. (Riyanto, 2026).

b. Teori manajemen Risiko.

Teori manajemen risiko digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. (Profil Risiko Itwasum Polri, 2023).

B. Studi Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Uraian Tentang Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Teori yang digunakan	Rekomendasi
JURNAL INTERNASIONAL				
1	Judul: <i>'None-the-wiser'? Citizenship education in preventing radicalisation: contrasting European and Middle East perspectives</i> Peneliti Francis Gaffney. Tahun Terbit: 2024	Metode: Kualitatif Hasil: Banyak pendidik merasakan keterbatasan dan kekurangan dalam implementasi citizenship education (pendidikan kewarganegaraan) untuk mencegah radikalisasi.	Teori <i>Citizenship Education</i>	Pengembangan kebijakan yang memperjelas peran <i>citizenship education</i> dalam konteks pencegahan radikalisasi di sekolah dan masyarakat.

JURNAL NASIONAL				
2	<p>Judul: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Radikalisme di Indonesia</p> <p>Peneliti: Azzahra Angger Kusumasari</p> <p>Tahun Terbit: 2024</p>	<p>Metode: Kualitatif</p> <p>Hasil: Penyebaran radikalisme di Indonesia terus berkembang karena lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat, generasi muda, serta lembaga perlu memiliki internalisasi nilai Pancasila yang kuat agar ideologi bangsa tetap kokoh dan mampu menekan radikalisme.</p>	<p>Teori Internalisasi Nilai</p>	<p>Penguatan internalisasi nilai Pancasila di masyarakat dan pendidikan formal; Peran aktif generasi muda, masyarakat, dan lembaga negara dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara</p>
3	<p>Judul: Peran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Isu Radikalisme.</p> <p>Peneliti: Esra Julita Br PA, dkk</p> <p>Tahun Terbit: 2024</p>	<p>Metode: kualitatif</p> <p>Hasil: Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila (seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial) dapat membantu mencegah penyebaran paham radikalisme dalam masyarakat dan sekolah.</p>	<p>Teori Pendidikan kewarga negara & teori nilai-nilai pancasila</p>	<p>Menguatkan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila di sekolah dan lingkungan masyarakat, agar nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan persatuan dapat terus dipahami dan diamalkan oleh generasi muda.</p>
NASKAP				
5	<p>Judul: Optimalisasi Penanggulangan Intoleransi, Radikalisme Dan Ekstrimisme Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri</p> <p>Peneliti: Agta Bhuwana Putra, S.I.K., M.A.</p> <p>Tahun Terbit: 2024</p>	<p>Metode: Deskriptif analisis</p> <p>Hasil Penelitian: Penanggulangan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme guna mencegah disintegrasi bangsa dilaksanakan berdasarkan Bab VIIA Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui mekanisme kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi belum optimal</p>	<p>Teori Penanggula ngan kejahatan</p>	<p>Peningkatan program Eradikasi dalam menghadapi meningkatnya dan berkembangnya paham-paham radikal pada</p>
6	<p>Judul: Optimalisasi Deradikalisasi Guna Mencegah Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kamdagri</p> <p>Peneliti: Erdhy Gian Gara S.H., S.I.K., M.S.I</p> <p>Tahun Terbit: 2024</p>	<p>Metode: Kualitatif dan kuantitatif</p> <p>Hasil Penelitian: Rehabilitasi dalam deradikalisasi belum optimal untuk mencegah tindak pidana terorisme. Terlihat dari aspek sosialisasi dan penguatan belum optimal.</p>	<p>Teori Deradikalisasi</p>	<p>Menyusun mekanisme pendataan secara komprehensif dan <i>up to date</i> dengan mantan napi terorisme yang telah mendapatkan program deradikalisasi</p>

C. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

- a. Teori SDM. Menurut Nawawi (2001:37) SDM merupakan orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi.
- b. Teori metode. Menurut Agustini dalam Zulkifli (2021), metode merupakan cara sistematis untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Pemilihan metode yang tepat menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan organisasi.

- c. Teori kolaborasi. Menurut Wilkan (2017), kolaborasi adalah kerja sama antara pihak-pihak yang saling mendukung guna mencapai tujuan bersama.
- d. Konsep Wawasan Kebangsaan. Menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI (2024) wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini berakar pada empat konsensus dasar negara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian NKP ini dibangun untuk menjelaskan kerangka berpikir mengenai optimalisasi penanaman nilai kebangsaan, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed method**, yaitu kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu desain penelitian (Creswell, 2014; Johnson & Wichern, 2017). Pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai metode utama karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam: kapasitas sumber daya manusia, metode penanaman nilai kebangsaan, dan bentuk kolaborasi dengan stakeholder dalam mencegah radikalisme.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode pendukung untuk memperkuat analisis melalui data numerik, seperti jumlah personel, frekuensi kegiatan pembinaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta statistik terkait indikasi radikalisme di wilayah hukum Polres Garut. Pendekatan ini dipilih agar penelitian menghasilkan gambaran yang komprehensif, menggabungkan pemahaman mendalam dan data objektif.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi, Dilakukan dengan menelaah dokumen resmi dan arsip (Sugiyono, 2019), terkait penanaman nilai kebangsaan di wilayah hukum Polres Garut, antara lain: Data personel; Data indikasi radikalisme atau eks narapidana terorisme di wilayah hukum Polres Garut; dan Data kegiatan pembinaan masyarakat dan sosialisasi nilai kebangsaan
2. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait pencegahan radikalisme, penanaman nilai kebangsaan dan kolaborasi dengan stakeholder (Baglione, 2012).
3. Menurut Eriyanto (2002) dalam *Analisis Framing*, analisis media bertujuan untuk memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan ditampilkan oleh media melalui proses seleksi, penonjolan, dan penyajian fakta. Dalam penelitian ini,

analisis media dilakukan dengan menelusuri pemberitaan daring dari sumber-sumber terpercaya mengenai kegiatan penanaman nilai kebangsaan, program deradikalisasi, serta isu radikalisme di wilayah hukum Polres Garut. Tujuannya adalah untuk memperkuat temuan empiris terkait efektivitas metode penanaman nilai kebangsaan, interaksi dengan masyarakat, dan respon publik terhadap upaya pencegahan radikalisme.

C. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan.

Menyusun kerangka penelitian, mengidentifikasi masalah, dan menentukan variabel penelitian: kapasitas sumber daya manusia, metode penanaman nilai kebangsaan, dan kolaborasi dengan stakeholder; serta membuat instrumen pengumpulan data.

2. Tahap Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan secara simultan melalui observasi dan studi dokumentasi. Proses ini dilakukan secara iteratif dan triangulatif untuk memastikan data yang diperoleh akurat, lengkap, dan representatif. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk melihat: jumlah dan frekuensi kegiatan pembinaan nilai kebangsaan, partisipasi masyarakat, serta indikator risiko penyebaran paham radikalisme. Data kualitatif dianalisis untuk memahami dinamika penanaman nilai-nilai kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nasionalisme) di masyarakat, efektivitas metode yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembinaan, termasuk peran stakeholder, budaya lokal, dan kondisi sosial masyarakat.

3. Tahap Analisis Data.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui distribusi kegiatan, partisipasi masyarakat, dan

indikator risiko radikalisme. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan pengelompokan berdasarkan tema: kapasitas sumber daya, metode pembinaan, dan kolaborasi stakeholder.

4. Tahap Interpretasi dan Penyusunan Laporan.

Hasil analisis dikaitkan dengan kerangka teori (RBV, *Dynamic Capability*, *Institutional Theory*, SFAS, dan Manajemen Risiko) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pembinaan. Menyusun rekomendasi strategi optimalisasi penanaman nilai kebangsaan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka SFAS (*Strategic Factors Analysis Summary*): Identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi berdasarkan kapasitas sumber daya manusia dan metode; Identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman) berdasarkan regulasi, kondisi sosial, dinamika masyarakat, dan potensi penyebaran radikalisme; Menyusun tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*); Memberikan bobot dan nilai prioritas pada masing-masing faktor menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana; Menentukan posisi strategis organisasi melalui peta posisi organisasi; Merumuskan faktor strategis utama dalam tabel SFAS untuk perencanaan strategi optimalisasi penanaman nilai kebangsaan; dan Menetapkan strategi implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk mitigasi risiko yang mungkin muncul.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Data

1. Kapasitas sumber daya manusia guna mendukung kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat

Menurut teori *Resource-Based View* (RBV) (Rengkung, 2015), keunggulan organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya internal yang dimiliki. Dalam konteks penanaman nilai kebangsaan di wilayah hukum Polres Garut, kapasitas organisasi dapat dianalisis berdasarkan teori Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Nawawi (2001:37), yang menyatakan bahwa SDM merupakan individu yang bekerja dan berfungsi sebagai aset strategis organisasi. Dengan demikian, SDM tidak hanya dipandang sebagai pelaksana tugas administratif, melainkan sebagai faktor utama yang menentukan efektivitas, kualitas kinerja, serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dikaitkan dengan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat, kapasitas SDM menjadi elemen kunci dalam mendukung kegiatan pembinaan. Hal tersebut menuntut kemampuan analisis sosial dan hukum, sensitivitas terhadap dinamika masyarakat, keterampilan komunikasi dan mediasi, pemahaman ideologi kebangsaan, serta integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Adapun data komposisi SDM Polres Garut sebagaimana tercantum pada tabel berikut menjadi dasar dalam menganalisis tingkat kesiapan dan kapasitas organisasi dalam mendukung kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Jumlah Personel Polres Garut

SATUAN	JUMLAH			KETERANGAN
	DSP	RIIL	POLICE RATIO	
Polres dan Jajaran (23 Polsek)	2.443	1.169	1 : 4.245	Personel RIIL tercapai 46,43%

Sumber: Lapsat Polres Garut Tahun 2025.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kebutuhan ideal personel (DSP) pada Polres Garut dan Jajaran berjumlah 2.443 personel, sementara jumlah riil yang tersedia hanya 1.169 atau baru mencapai 46,43% dari kebutuhan, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1.274 personel. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya *police ratio* sebesar 1:4.245, yang berarti satu anggota Polri melayani kurang lebih 4.245 penduduk. Rasio ini menunjukkan beban kerja yang cukup besar bagi setiap personel, dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan kuantitas SDM tersebut berimplikasi pada belum optimalnya jangkauan pelayanan dan pembinaan masyarakat, termasuk dalam kegiatan penanaman nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, jumlah personel khususnya pada Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di Polres Garut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Jumlah Satbinmas Polres Garut

SATUAN	JUMLAH		KETERANGAN
	DSP	RIIL	
Polres	22	10	Tercapai 45,45%

Sumber: LKIP Polres Garut Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, jumlah kebutuhan ideal (DSP) personel Satbinmas adalah 22 orang, sedangkan jumlah riil yang tersedia hanya 10 orang atau sekitar 45,45% dari kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan 12 personel atau lebih dari separuh formasi yang seharusnya terpenuhi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas pembinaan masyarakat, mengingat Satbinmas merupakan fungsi utama yang bertanggung jawab dalam

kegiatan preventif dan preemtif, termasuk penanaman nilai kebangsaan, penyuluhan hukum, serta pembinaan kemitraan dengan masyarakat. Keterbatasan jumlah personel berpotensi menyebabkan beban kerja yang tinggi, keterbatasan jangkauan wilayah pembinaan, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan berbasis komunitas. Dari perspektif teori Sumber Daya Manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SDM merupakan aset strategis organisasi, pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan kuantitas.

Sementara itu, untuk mendukung jangkauan penanaman nilai kebangsaan hingga tingkat desa, diperlukan dukungan kapasitas personel Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat di wilayah. Data terkait jumlah dan pelatihan Bhabinkamtibmas di Polres Garut sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Jumlah dan pelatihan Bhabinkamtibmas Polres Garut

SATUAN	JUMLAH			KETERANGAN
	DESA	BHABINKAMTIBMAS	PELATIHAN / DIKJUR	
Polres Jajaran	445	237	30	-1 Bhabin 1 desa baru tercapai 53,26% - Sudah mengikuti Dikjur 12,66%

Sumber: LKIP Polres Garut Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dari total 445 desa di wilayah hukum Polres Garut, baru 237 desa yang memiliki Bhabinkamtibmas, sehingga capaian program 1 Desa 1 Bhabin baru mencapai 53,26%. Artinya, masih terdapat 208 desa yang belum memiliki personel Bhabinkamtibmas secara ideal. Selain itu, dari 237 personel yang ada, hanya 30 orang atau sekitar 12,66% yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dikjur), sehingga tingkat peningkatan kompetensi masih relatif rendah.

Secara strategis, kondisi ini berdampak pada belum optimalnya jangkauan pembinaan dan penanaman nilai

kebangsaan di tingkat desa. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam fungsi preventif dan preemtif, termasuk deteksi dini potensi radikalisme, mediasi konflik sosial, serta penguatan wawasan kebangsaan di masyarakat. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan adanya wilayah yang belum terjangkau secara intensif, sedangkan rendahnya tingkat pelatihan / Dikjur berpotensi memengaruhi kualitas pendekatan pembinaan yang dilakukan. Dari perspektif teori Sumber Daya Manusia dan *Resource-Based View*, meskipun Bhabinkamtibmas merupakan aset strategis organisasi, kapasitasnya belum sepenuhnya optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

2. Metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat

Menurut Agustini dalam Zulkifli (2021), metode merupakan cara yang sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam konteks penanaman nilai kebangsaan, pelaksanaannya harus disusun secara terencana, terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, sehingga setiap tahapan kegiatan memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Selaras dengan konsep wawasan kebangsaan yang dikemukakan oleh Prof. Muladi, menekankan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, metode penanaman nilai kebangsaan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara normatif, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi ideologis bangsa.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai kebangsaan harus dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, dengan menyesuaikan karakteristik sosial masyarakat serta dinamika lingkungan strategis, sehingga mampu membentuk ketahanan ideologi dan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh paham radikalisme. Adapun pelaksanaan kegiatan penanaman nilai kebangsaan di wilayah hukum Polres Garut dilaksanakan melalui fungsi pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, yang mencakup kegiatan ceramah, Binluh, sosialisasi dan FGD. Kegiatan tersebut ditujukan kepada berbagai segmen seperti masyarakat, tokoh agama dan pelajar.

Tabel 4.4
Data Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanaman Nilai Kebangsaan

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH			KETERANGAN
		2023	2024	2025	
1.	Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat	NIHIL	NIHIL	4	Tahun 2023 dan 2024 belum dilaksanakan
2.	Sosialisasi dan Edukasi kepada tokoh agama	NIHIL	NIHIL	7	
3.	Sosialisasi dan Edukasi kepada pelajar	NIHIL	NIHIL	11	
	TOTAL	NIHIL	NIHIL	22	

Sumber: Laporan Satbinmas Polres Garut 2023-2025

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang Data Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanaman Nilai Kebangsaan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat kegiatan yang secara khusus tercatat sebagai program penanaman nilai kebangsaan (NIHIL), sedangkan pada tahun 2025 mulai dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan yang terdiri dari 4 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum, 7 kegiatan kepada tokoh agama, dan 11 kegiatan kepada pelajar. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai kebangsaan baru mulai diintensifkan pada tahun 2025 dengan menyasar kelompok strategis, khususnya pelajar

sebagai generasi muda yang rentan terhadap pengaruh paham radikal serta tokoh agama yang memiliki pengaruh sosial dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Garut yang mencakup 23 Polsek dan 445 desa, jumlah kegiatan tersebut masih relatif terbatas, sehingga jangkauan dan pemerataan program belum optimal serta masih memerlukan peningkatan dari aspek frekuensi, distribusi wilayah, dan keberlanjutan pelaksanaan agar lebih efektif dalam mendukung pencegahan radikalisme.

Berdasarkan *Dynamic Capability Theory* (Bleady et al., 2018), kemampuan organisasi tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi dari kapasitasnya untuk *sensing* (mendeteksi perubahan lingkungan), *seizing* (merespons peluang atau ancaman), dan *transforming* (menyesuaikan serta memperbaiki kompetensi organisasi secara berkelanjutan). Dalam konteks penanaman nilai kebangsaan di wilayah hukum Polres Garut, data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat kegiatan yang tercatat secara khusus (nihil), sedangkan pada tahun 2025 mulai dilaksanakan 22 kegiatan. Peningkatan ini dapat dipahami sebagai bentuk awal kemampuan *sensing*, yaitu adanya kesadaran organisasi terhadap meningkatnya potensi ancaman radikalisme sehingga diperlukan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kebangsaan.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, kapasitas *seizing* atau kemampuan merespons ancaman secara optimal masih perlu diperkuat. Hal ini terlihat dari jumlah kegiatan yang relatif terbatas dibandingkan dengan luas wilayah 23 Polsek dan 445 desa, sehingga respons organisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan masih dominan

dalam bentuk sosialisasi konvensional (ceramah, binluh, FGD), yang menunjukkan bahwa inovasi metode dan adaptasi terhadap dinamika digital belum sepenuhnya berkembang.

Pada aspek *transforming*, Dynamic Capability Theory menekankan pentingnya pembaruan strategi secara berkelanjutan agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dapat dipandang sebagai fase awal transformasi, namun masih memerlukan penguatan melalui perencanaan jangka panjang, integrasi teknologi informasi, segmentasi sasaran berbasis risiko, serta evaluasi berbasis outcome. Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Dynamic Capability Theory*, Polres Garut telah menunjukkan langkah adaptif awal dalam penanaman nilai kebangsaan, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi metode, dan transformasi organisasi secara berkelanjutan agar mampu membangun ketahanan ideologi masyarakat secara lebih efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme yang dinamis.

3. Kolaborasi dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat

Menurut Wilkan (2017), kolaborasi adalah kerja sama antara pihak-pihak yang saling mendukung guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penanaman nilai kebangsaan, kolaborasi menjadi faktor strategis karena upaya pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan secara parsial oleh institusi kepolisian semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, instansi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas sosial lainnya. Setiap stakeholder memiliki peran dan sumber daya yang berbeda, baik dalam aspek regulasi, pendidikan, pembinaan sosial, maupun penguatan nilai keagamaan yang moderat.

Kolaborasi yang efektif tidak hanya berbentuk koordinasi formal, tetapi juga harus terwujud dalam program bersama yang terencana, pembagian peran yang jelas, serta pertukaran informasi yang berkelanjutan. Melalui pola kemitraan yang terintegrasi, kegiatan penanaman nilai kebangsaan dapat menjangkau lebih luas lapisan masyarakat dan memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dalam membangun ketahanan ideologi.

Untuk mengetahui sejauh mana bentuk kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan di wilayah hukum Polres Garut, berikut disajikan data kolaborasi dengan stakeholder sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Data Kolaborasi Dengan Stakeholder Dalam Mendukung Penanaman Nilai Kebangsaan Kepada Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN / STAKEHOLDER	TAHUN			TOTAL
		2023	2024	2025	
1.	Sosialisasi & Edukasi kepada Masyarakat	NIHIL	NIHIL	6	6
2.	Kerja Sama dengan Pemda	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Kerja Sama dengan Kodim	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Kerja Sama dengan Disdik	NIHIL	NIHIL	12	12
5.	Kemitraan dengan Tokoh Agama (Pesantren)	NIHIL	NIHIL	7	7
6.	Kemitraan dengan Tokoh Pemuda	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7.	Kemitraan dengan Komunitas Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TOTAL KESELURUHAN	NIHIL	NIHIL	25	25

Sumber: Laporan Satbinmas Polres Garut 2023-2025.

Berdasarkan Tabel 4.5 tentang Data Kolaborasi dengan Stakeholder dalam Mendukung Penanaman Nilai Kebangsaan, terlihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat kegiatan kolaboratif yang tercatat secara khusus (nihil), sedangkan pada tahun 2025 mulai terjalin 25 kegiatan kerja sama, yang terdiri dari 6 kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, 12 kerja sama dengan Dinas Pendidikan, serta 7 kemitraan dengan tokoh agama/pesantren. Data ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi baru mulai diintensifkan

pada tahun 2025 dan masih terkonsentrasi pada sektor pendidikan dan keagamaan sebagai mitra strategis dalam pembinaan nilai kebangsaan. Namun demikian, belum adanya kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kodim, tokoh pemuda, maupun komunitas masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor belum berjalan secara komprehensif dan terintegrasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sinergi kelembagaan masih bersifat terbatas dan belum optimal dalam membangun pendekatan pencegahan radikalisme yang menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan kemitraan yang lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan agar penanaman nilai kebangsaan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara efektif.

Berdasarkan *Institutional Theory* (Scott dalam Villadsen, 2011), perilaku dan kebijakan organisasi sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan eksternal yang meliputi aspek regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Dalam konteks Tabel 4.5, data menunjukkan bahwa kolaborasi penanaman nilai kebangsaan baru mulai terbangun pada tahun 2025 dengan total 25 kegiatan, yang didominasi oleh kerja sama dengan Dinas Pendidikan (12 kegiatan) dan kemitraan dengan tokoh agama/pesantren (7 kegiatan), sementara kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Kodim, tokoh pemuda, dan komunitas masyarakat masih nihil. Secara institusional, kondisi ini menunjukkan bahwa Polres Garut telah mulai merespons tekanan normatif dan kultural, khususnya dari sektor pendidikan dan keagamaan yang secara sosial memiliki legitimasi kuat dalam pembentukan nilai dan karakter masyarakat. Namun demikian, dari perspektif pilar regulatif, belum optimalnya kerja sama formal dengan Pemda dan Kodim mengindikasikan bahwa dukungan struktural dan kebijakan lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka kelembagaan yang kuat. *Institutional Theory*

menekankan bahwa legitimasi organisasi akan semakin kuat apabila terdapat kesesuaian (isomorphism) antara kebijakan internal organisasi dengan ekspektasi lingkungan kelembagaan. Oleh karena itu, agar penanaman nilai kebangsaan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan kolaborasi yang lebih komprehensif melalui mekanisme formal, forum lintas sektor, dan kebijakan bersama sehingga tercipta keselarasan antara institusi kepolisian dan sistem sosial yang lebih luas dalam mencegah penyebaran paham radikalisme.

B. Pembahasan Hasil Analisis

1. Faktor Lingkungan Strategis

Berdasarkan hasil analisis RBV, *Dinamic* dan *Institutional* dapat di analisis lingkungan strategis sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang

- a) Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana inovatif untuk sosialisasi digital, kampanye literasi kebangsaan, serta kontra narasi terhadap paham radikalisme.
- b) Kerja sama strategis dengan Dinas Pendidikan, yang telah terealisasi pada tahun 2025, menjadi peluang untuk memasukkan materi wawasan kebangsaan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah sebagai upaya pencegahan dini terhadap pelajar.
- c) Kemitraan dengan tokoh agama dan pesantren, yang memiliki legitimasi sosial dan pengaruh kuat dalam membentuk

pemahaman keagamaan moderat di masyarakat.

- d) Kebijakan pemerintah dan program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga membuka ruang penguatan program pembinaan berbasis ideologi kebangsaan di daerah.
 - e) Potensi dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dalam bentuk program pembinaan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
 - f) Karakteristik masyarakat Garut yang religius dan komunal, yang memungkinkan pendekatan berbasis kultural dan keagamaan menjadi lebih efektif apabila dilakukan melalui pola kolaboratif dan partisipatif.
- 2) Ancaman
- a) Kolaborasi lintas sektor belum komprehensif, karena belum terjalinnya kerja sama formal dengan Pemda, Kodim, tokoh pemuda, dan komunitas masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan.
 - b) Terdapatnya eks narapidana terorisme di wilayah Garut, yang berpotensi menimbulkan kerawanan ideologis apabila proses penanaman nilai kebangsaan tidak berjalan optimal.
 - c) Luas wilayah dan jumlah desa yang besar (445 desa), yang berpotensi menimbulkan

kesenjangan jangkauan pembinaan akibat keterbatasan personel.

- d) Terdapatnya jejak aktivitas kelompok radikal seperti Jamaah Ansharut Daulah di wilayah Garut, yang menunjukkan adanya potensi jaringan atau simpatisan yang masih dapat memengaruhi sebagian masyarakat, sehingga memerlukan langkah preventif melalui penguatan penanaman nilai kebangsaan secara berkelanjutan.

b. Analisis Lingkungan Internal

1) Kekuatan

- a) Terdapatnya kegiatan sosialisasi dan edukasi nilai kebangsaan pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya kemampuan sensing dan adaptasi awal sebagaimana dijelaskan dalam Dynamic Capability Theory.
- b) Keberadaan 237 personel Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak pembinaan di tingkat desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
- c) Adanya fungsi Satbinmas sebagai leading sector pembinaan masyarakat, yang secara struktural memiliki mandat preventif dan preemtif dalam penanaman nilai kebangsaan.
- d) Struktur organisasi Polres Garut yang mencakup 23 Polsek jajaran, sehingga memiliki jaringan kelembagaan hingga tingkat kecamatan yang dapat menjadi perpanjangan tangan dalam pelaksanaan

penanaman nilai kebangsaan secara lebih luas dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten Garut.

2) Kelemahan

- a) Belum adanya perencanaan program penanaman nilai kebangsaan yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan, sehingga pelaksanaan kegiatan masih bersifat insidental dan belum berbasis pada pemetaan risiko, target capaian yang terukur (*outcome-based*), serta sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis.
- b) Belum adanya sosialisasi penanaman nilai kebangsaan melalui media *online*.
- c) Keterbatasan personel Satbinmas (45,45% dari kebutuhan ideal), sehingga kapasitas fungsi pembinaan belum optimal.
- d) Rendahnya tingkat pelatihan/Dikjur Bhabinkamtibmas (12,66%), yang berpotensi memengaruhi kualitas pendekatan pembinaan ideologi kebangsaan.
- e) Belum terpenuhinya program 1 Desa 1 Bhabinkamtibmas (baru 53,26%), yang menyebabkan masih adanya desa yang belum terjangkau secara intensif.
- f) Metode sosialisasi masih dominan konvensional (ceramah, Binluh, FGD).

2. Pembahasan Aspek

a. *External Factors Analysis Summary (EFAS)*

Tabel 4.6

External Factor Analysis Summary (EFAS)

NO	KEY EXTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	SCORE
PELUANG				
1.	Perkembangan TI	0.117	8	0.936
2.	Kerja sama dengan Disdik	0.104	7	0.728
3.	Kemitraan dengan tokoh agama	0.105	7	0.735
4.	Kebijakan pemerintah program deradikalisasi	0.095	6	0.570
5.	Potensi dukungan Pemda (Bakesbangpol)	0.091	6	0.546
6.	Karakteristik masyarakat religius	0.088	7	0.616
		0.600		4.131
ANCAMAN				
1.	Kolaborasi lintas sektoral blm komprehensif	0.122	2	0.244
2.	Terdapatnya eks narapidana terorisme	0.126	3	0.378
3.	Terdapatnya jejak kelompok radikal	0.090	4	0.360
4.	Luas wilayah yang besar	0.062	3	0.186
		0.400		1.168
TOTAL		1.00		5.299

b. *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)*

Tabel 4.7

Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

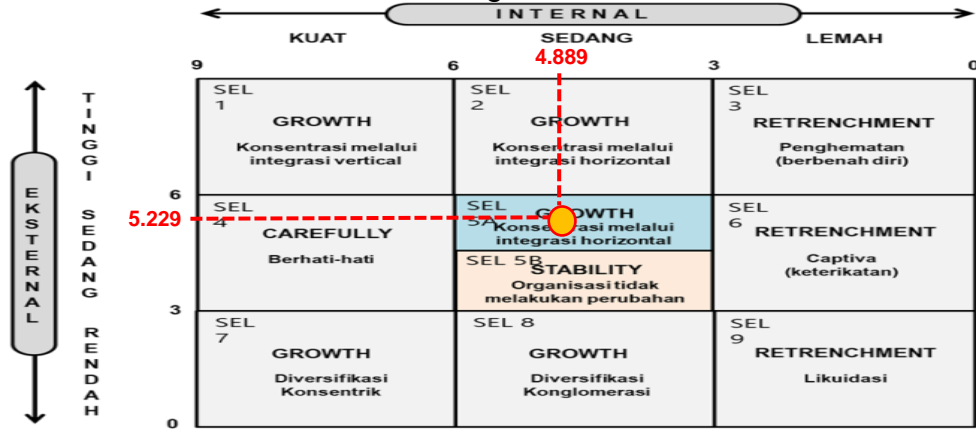
NO	KEY INTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	SCORE
KEKUATAN				
1.	Terdapatnya kegiatan sosialisasi	0.115	8	0.920
2.	Keberadaan Bhabinkamtibmas	0.104	8	0.832
3.	Adanya fungsi Satbinmas	0.096	6	0.576
4.	Struktur organisasi Polres dan polsek jajaran	0.086	8	0.688
		0.400		3.016
KELEMAHAN				
1.	Belum adanya perencanaan program	0.113	3	0.339
2.	Belum adanya sosialisasi media <i>online</i>	0.085	3	0.255
3.	Keterbatasan personel Satbinmas	0.108	2	0.216
4.	rendahnya tingkat pelatihan Bhabin	0.117	3	0.351
5.	Belum terpenuhinya program 1 desa 1 Bhabin	0.094	4	0.376
6.	Sosialisasi masih dominan konvensional	0.084	4	0.336
		0.600		1.873
TOTAL		1.00		4.889

C. Formulasi dan Implementasi Strategi

1. Formulasi Strategi

a. Posisi Organisasi

Gambar 4.1
Posisi Organisasi



Posisi organisasi Polri berada pada sel-2, secara eksternal organisasi memiliki kondisi Sedang dan internal Sedang. Situasi ini mendorong *strategi integrasi horizontal*, organisasi perlu memperluas keterlibatan dengan pihak eksternal. kata kunci optimalisasi.

b. Penentuan SFAS (*Strategic Factor Analysis Summary*)

Tabel 4.8

Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)

NO	FAKTOR STRATEGI KUNCI	WEIGHT	RATING	SCORE	JANGKA WAKTU		
					KADEK	KADANG	KAJANG
1.	Menyusun Rencana Aksi Penanaman Nilai Kebangsaan berbasis risiko dan berkelanjutan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kinerja, dilengkapi target capaian (outcome), indikator terukur, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala.	0.087	3	0.261			
2.	Melaksanakan program peningkatan kapasitas (capacity building) Bhabinkamtibmas tematik kebangsaan melalui pelatihan internal dan Dikjur bertahap	0.064	3	0.192			
3.	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi penanaman nilai kebangsaan secara prioritas pada wilayah yang terdapat eks narapidana terorisme guna memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di Kabupaten Garut.	0.090	3	0.270			
4.	Mengembangkan model pembinaan kebangsaan berbasis teknologi informasi melalui kampanye media sosial, produksi konten kontra-narasi, serta	0.127	8	1.016			

	optimalisasi platform daring sebagai sarana edukasi generasi muda.						
5.	Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi berjalan menjadi program rutin dan terstruktur dengan perluasan jangkauan wilayah, serta penguatan kualitas materi dan metode penyampaian.	0.070	8	0.560			
6.	Memformalkan kerja sama melalui kesepakatan dan integrasi program wawasan kebangsaan di sekolah, termasuk pembentukan duta pelajar kebangsaan dan agenda pembinaan berkala.	0.084	7	0.588			
7.	Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan ideologi di desa, dengan pembagian wilayah prioritas dan kewajiban pelaporan kegiatan pembinaan secara sistematis.	0.081	8	0.648			
8.	Menerapkan strategi kolaboratif dan pelibatan lintas fungsi internal, serta pemberdayaan mitra masyarakat guna memperluas jangkauan pembinaan tanpa bergantung pada penambahan personel semata.	0.148	2	0.296			
9.	Membangun forum komunikasi kebangsaan berbasis keagamaan (tokoh agama) untuk memperkuat moderasi beragama dan penyampaian nilai kebangsaan melalui pendekatan kultural-religius.	0.146	7	1.022			
10.	Membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor Penanaman Nilai Kebangsaan yang melibatkan Pemda, TNI, tokoh pemuda, dan komunitas agar tercipta sinergi program yang terintegrasi dan berkelanjutan.	0.104	2	0.208			

Keterangan:

- 1) Score tertinggi dikurangi terendah yakni 1,022 – 0,192 Hasilnya dibagi 3 maka hasil 0,277 sebagai nilai koefisien.
- 2) Strategi jangka pendek, jumlah nilai terendah 0,192 + nilai koefisien 0,277 hasil 0,469. Strategi jangka pendek mulai dari angka 0,469 ke bawah.
- 3) Jangka panjang, nilai tertinggi 1,022 – nilai koefisien 0,277 hasil 0,745. Nilai jangka panjang mulai dari angka 0,745 ke atas.
- 4) Jangka sedang diantara nilai jangka pendek dan panjang.

c. Visi

Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mencegah penyebaran paham radikalisme melalui optimalisasi penanaman nilai kebangsaan.

d. Misi

Meningkatkan kapasitas SDM; membenahi metode; dan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat.

e. Tujuan

Meningkatnya kapasitas SDM; terbentahnya metode; dan meningkatnya kolaborasi dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat.

f. Kebijakan

Untuk mengoptimal penanaman nilai kebangsaan, disusun berdasarkan regulasi: UUD 1945; UU No. 2/2002 Tentang Polri; Perpol No. 1/2021 tentang Polmas; Perkap No. 12/2014 Tentang Kerja Sama Polri.

g. Strategi

Berdasarkan analisis posisi organisasi, Strategi untuk mengoptimalkan penanaman nilai kebangsaan adalah *Horizontal Integration Strategy*, yakni meningkatkan perluasan kolaborasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal.

2. Implementasi Strategi**a. Strategi Jangka Pendek (0 – 3 bulan)**

1) Strategi Jangka Pendek Ke-1 : Menyusun Rencana Aksi Penanaman Nilai Kebangsaan berbasis risiko dan berkelanjutan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kinerja, dilengkapi target capaian (outcome), indikator terukur, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya perencanaan program penanaman nilai kebangsaan yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan kinerja Polres guna mendukung pencegahan radikalisme.	Menyusun rencana aksi melalui penetapan wilayah prioritas, segmentasi sasaran (pelajar, tokoh agama, masyarakat), serta penjadwalan kegiatan pembinaan	Rencana Aksi Penanaman Nilai Kebangsaan, tercapai 80%
	Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, pengukuran capaian output dan outcome, serta penyempurnaan strategi berdasarkan hasil evaluasi.	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan tahap awal sebagai dasar perbaikan program berikutnya. tercapai 80%

2) Strategi Jangka Pendek Ke-2 : Melaksanakan program peningkatan kapasitas (capacity building) Bhabinkamtibmas tematik kebangsaan melalui pelatihan internal dan Dikjur bertahap

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pembinaan nilai kebangsaan.	Pelaksanaan pelatihan internal terkait wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan deteksi dini radikalisme serta pengiriman personel secara bertahap untuk mengikuti Dikjur Polmas	Pelatihan dan Dikjur Bhabinkamtibmas, tercapai, 80%
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	Terlaksananya evaluasi, tercapai 80%

3) Strategi Jangka Pendek Ke-3 : Meningkatkan sosialisasi dan edukasi penanaman nilai kebangsaan secara prioritas pada wilayah yang terdapat eks narapidana terorisme guna memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di Kabupaten Garut.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya intensitas dan efektivitas pembinaan nilai kebangsaan pada wilayah prioritas yang memiliki kerawanan ideologis akibat keberadaan eks narapidana terorisme.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi, Binluh, dan dialog kebangsaan secara terfokus di desa/kecamatan yang teridentifikasi memiliki eks Napiter, dengan segmentasi sasaran tokoh masyarakat, keluarga, pemuda, dan pelajar.	Terlaksananya sosialisasi binluh dan dialog kebangsaan, tercapai, 80%
	Melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan unsur pendidikan dalam penyampaian materi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap paham radikal.	Keterlibatan tokoh agama, perangkat desa dan unsur pendidikan, tercapai 80%

4) Strategi Jangka Pendek Ke-4 : Menerapkan strategi kolaboratif dan pelibatan lintas fungsi internal, serta pemberdayaan mitra masyarakat guna memperluas jangkauan pembinaan tanpa bergantung pada penambahan personel semata.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya jangkauan dan efektivitas pelaksanaan penanaman nilai kebangsaan melalui optimalisasi sinergi lintas fungsi internal dan kemitraan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut..	Melibatkan fungsi Intelkam, Sihumas, Binmas, Samapta, dan Polek jajaran dalam mendukung kegiatan pembinaan nilai kebangsaan melalui pembagian peran yang jelas dan terkoordinasi.	Pelibatan lintas fungsi, tercapai 80%
	Melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sebagai mitra dalam penyebarluasan nilai kebangsaan	Kolaborasi, tercapai 80%

- 5) **Strategi Jangka Pendek Ke-5** : Membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor Penanaman Nilai Kebangsaan yang melibatkan Pemda, TNI, tokoh pemuda, dan komunitas agar tercipta sinergi program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya mekanisme koordinasi lintas sektor yang formal dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan penanaman nilai kebangsaan.	Melaksanakan rapat koordinasi awal, menyusun struktur forum, menetapkan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder (Pemda, TNI, tokoh pemuda, komunitas), serta menerbitkan kesepakatan bersama atau nota kesepahaman.	Terbentuknya forum koordinasi, tercapai 80%
	Menyusun rencana kerja bersama, menyelaraskan agenda kegiatan kebangsaan antar instansi, serta menetapkan pola komunikasi dan pertukaran informasi secara berkala.	Tersusunnya rencana kerja bersama, tercapai 80%

b. Strategi Jangka Sedang (0 – 6 bulan)

- 1) **Strategi Jangka Sedang ke-1** : Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi berjalan menjadi program rutin dan terstruktur dengan perluasan jangkauan wilayah, serta penguatan kualitas materi dan metode penyampaian.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya program sosialisasi dan edukasi nilai kebangsaan yang rutin, terjadwal, dan menjangkau wilayah secara lebih luas.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara rutin dan terjadwal setiap 1 minggu sekali	Kegiatan sosialisasi setiap minggu, tercapai 90%
	Mengembangkan sosialisasi penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan <i>Police Goes to School</i> , Diskusi kelas, pembentukan duta pelajar, penyuluhan Kamtibmas, Dialog kebangsaan lintas pemuda, Safari kebangsaan oleh Bhabin & Satsamapta Deklarasi anti radikal	Pengembangan sosialisasi. Tercapai 90%

- 2) **Strategi Jangka Sedang ke-2** : Memformalkan kerja sama melalui kesepakatan dan integrasi program wawasan kebangsaan di sekolah, termasuk pembentukan duta pelajar kebangsaan dan agenda pembinaan berkala.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terbangunnya kemitraan formal dan berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wawasan kebangsaan	Melaksanakan kesepakatan bersama dengan Diskdik Daerah untuk melaksanakan program penanaman nilai kebangsaan secara rutin dan terjadwal	Terlaksananya koordinasi formal dengan Disdik, tercapai 90%
	Melaksanakan evaluasi bersama efektivitas penanaman nilai kebangsaan	Evaluasi bersama, tercapai 90%

- 3) **Strategi Jangka Sedang ke-3** : Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan ideologi di desa, dengan pembagian wilayah prioritas dan kewajiban pelaporan kegiatan pembinaan secara sistematis.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Optimalnya peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembinaan ideologi dan penanaman nilai kebangsaan di tingkat desa secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.	Melakukan pemetaan desa berdasarkan tingkat kerawanan ideologi, menetapkan desa prioritas, serta menyusun pedoman tugas bagi Bhabinkamtibmas.	Tersusun desa prioritas pembinaan nilai kebangsaan dan pedoman tugas Bhabinkamtibmas, tercapai 90%
	Melaksanakan pembinaan kepada desa prioritas tentang penanaman nilai kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi desa prioritas, tercapai 90%

c. **Strategi Jangka Panjang (0 – 12 bulan)**

- 1) **Strategi Jangka Panjang ke-1:**
Mengembangkan model pembinaan kebangsaan berbasis teknologi informasi melalui kampanye media sosial, produksi konten kontra-narasi, serta optimalisasi platform daring sebagai sarana edukasi generasi muda.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terbangunnya sistem pembinaan nilai kebangsaan berbasis digital yang adaptif, menjangkau generasi muda, dan mampu menjadi kontra-narasi terhadap paham radikal di ruang siber.	Membentuk tim pengelola media sosial dan memproduksi konten edukatif (video pendek, infografis, podcast, testimoni tokoh) yang dikelola oleh Sihumas dan Satbinmas	Terbentuknya tim pengelola media sosial dan produksi konten edukasi nilai kebangsaan. Tercapai 90%
	Menyelenggarakan webinar / <i>live session</i> kebangsaan, literasi digital melalui media sosial untuk membekali generasi muda dalam menghadapi propaganda.	Terselenggaranya webinar / <i>live session</i> kebangsaan serta sosialisasi edukasi literasi digital melalui media sosial. tercapai 90%

- 2) **Strategi Jangka Panjang ke-2:** Membangun forum komunikasi kebangsaan berbasis keagamaan (tokoh agama) untuk memperkuat moderasi beragama dan penyampaian nilai kebangsaan melalui pendekatan kultural-religius.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terbentuknya wadah komunikasi lintas tokoh dan organisasi keagamaan yang berperan aktif dalam menyampaikan nilai kebangsaan secara moderat, inklusif, dan berkelanjutan.	Menginisiasi pertemuan tokoh agama, membentuk struktur forum komunikasi, menetapkan komitmen bersama tentang moderasi beragama dan nilai kebangsaan, serta menyusun rencana kerja forum tahunan	Terbentuknya Forum Komunikasi Kebangsaan Berbasis Keagamaan, tercapai 90%
	Mendorong penyampaian materi kebangsaan dalam ceramah, pengajian, khutbah, & forum keagamaan serta melaksanakan dialog kebangsaan lintas agama secara berkala.	Terlaksananya dialog kebangsaan lintas umat beragama, tercapai 90%.

D. Manajemen Risiko

1. **Komunikasi dan Konsultasi:** Dilaksanakan pada setiap tahapan proses manajemen risiko dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
2. **Penetapan Konteks:** Ditetapkan R1: Melaksanakan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) Bhabinkamtibmas tematik kebangsaan melalui pelatihan internal dan Dikjur bertahap (strategi jangka pendek); R2: Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi berjalan menjadi program rutin dan terstruktur dengan perluasan jangkauan wilayah, serta penguatan kualitas materi dan metode penyampaian (strategi jangka sedang); R3: Membangun forum komunikasi kebangsaan berbasis keagamaan untuk memperkuat moderasi beragama dan penyampaian nilai kebangsaan melalui pendekatan kultural-religius. (strategi jangka panjang).
3. **Identifikasi Risiko:** Identifikasi risiko R1: Level risiko 19 (Tinggi); R2: Level risiko 23 (Sangat Tinggi); dan R3: Level risiko 17 (Tinggi).
4. **Analisis Risiko:** Analisis risiko R1: Skor efektivitas pengendalian 6 (kurang efektif); R2: Skor 7 (kurang efektif); dan R3: Skor efektivitas pengendalian 7 (kurang efektif).
5. **Evaluasi Risiko:** Nilai risiko residual setiap risiko yang telah dilakukan pengendalian R1 dengan nilai risiko residual 14 (sedang); R2 16 (Tinggi) dan R3 nilai risiko residul 11 (Rendah).
6. **Mitigasi Risiko:** R1: Setelah dilakukan Perbaikan melalui mitigasi, level risiko aktual mengalami penurunan menjadi 7 (rendah). R2: menjadi 10 (rendah) dan R3: menjadi 5 (sangat rendah).
7. **Pemantauan dan Reviuw:** Dilaksanakan melalui rapat berkala, rapat insidentil, FGD dan membangun sistem manajemen risiko dengan *timeline* bulan Januari sampai Desember 2027.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kapasitas sumber daya manusia guna mendukung kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat masih terbatas, terlihat dari belum setiap personel memiliki Dikbangspes dan belum dilakukannya pelatihan, sehingga berdampak pada kemampuan personel dalam penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat kurang berjalan optimal. Untuk itu diperlukan strategi optimalisasi dengan: Melaksanakan program peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas.
2. Metode penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat belum optimal, terlihat dari data kegiatan pembinaan penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat baru berjalan pada tahun 2025. Akibatnya penanaman nilai kebangsaan masih terbatas belum menjangkau setiap wilayah. Untuk itu diperlukan strategi optimalisasi dengan: Menyusun Rencana Aksi Penanaman Nilai Kebangsaan berbasis risiko dan berkelanjutan; Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi berjalan menjadi program rutin; Meningkatkan sosialisasi dan edukasi penanaman nilai kebangsaan secara prioritas pada wilayah yang terdapat eks narapidana terorisme; Mengembangkan model pembinaan kebangsaan berbasis teknologi informasi melalui kampanye media sosial; dan Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan ideologi di desa.
3. Kolaborasi dengan stakeholder dalam mendukung penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat belum komprehensif, hanya dilaksanakan dengan Disdik dan tokoh agama saja (pesantren) belum melibatkan pihak terkait lainnya seperti dengan Pemda, Kodim, tokoh pemdua dan komunitas masyarakat. Akibatnya sosialisasi dan edukasi penanaman

nilai kebangsaan kepada masyarakat masih parsial. Untuk itu diperlukan strategi optimalisasi dengan: Memformalkan kerja sama melalui kesepakatan dan integrasi program wawasan kebangsaan di sekolah; Menerapkan strategi kolaboratif dan pelibatan lintas fungsi internal, serta pemberdayaan mitra masyarakat guna memperluas jangkauan pembinaan tanpa bergantung pada penambahan personel semata; Membangun forum komunikasi kebangsaan berbasis keagamaan (tokoh agama); Membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor Penanaman Nilai Kebangsaan yang melibatkan Pemda, TNI, tokoh pemuda, dan komunitas agar tercipta sinergi program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Menyarankan kepada Kapolda U.p Karo SDM agar menyelenggarakan pelatihan kepada personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas tentang pemahaman wawasan kebangsaan sebagai pilar pencegahan penyebaran paham radikal guna meningkatkan kemampuan dalam sosialisasi dan edukasi penanaman nilai kebangsaan kepada masyarakat.
2. Menyarankan kepada Kapolda U.p Dirbinmas agar membuat pedoman teknis pembinaan tentang penanaman nilai kebangsaan sehingga dapat dipedomani oleh seluruh personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas di Polres jajaran.
3. Menyarankan kepada Kapolda U.p Dirbinmas agar membuat MoU dengan pihak terkait khususnya dengan Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka integrasi program penanaman nilai kebangsaan dan pembinaan generasi muda secara terkoordinasi dan berkelanjutan (Pelibatan Satbinmas dalam kegiatan pembinaan nilai kebangsaan pada setiap upacara di sekolah, program *Police Goes To School* dan Polisi Cilik), sehingga dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Polres jajaran.

